SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DI HAMBURG

NOMOR: 16/SK/V/2018

TENTANG

PERUBAHAN SASARAN STRATEGIS DAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERWAKILAN RI HAMBURG TAHUN 2018

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI HAMBURG

Menimbang : a. bahwa Tujuan dan Sasaran Strategis pada Rencana Strategis Perwakilan RI Hamburg Tahun 2015—2019 dengan pendekatan *Balanced Scorecard* perlu diterjemahkan ke dalam peta strategi yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

b. bahwa sebagai tindak lanjut atas telah ditetapkannya Perjanjian Kinerja (PK) Perwakilan RI Hamburg Tahun 2018, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan penyajian Sasaran Strategis pada Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI Hamburg Nomor 004/SK/IV/2016 tentang Revisi Rencana Strategis (Renstra) KJRI Hamburg Tahun 2015—2019 serta Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI Hamburg Nomor 012/SK/VII/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hamburg Tahun 2015-2019.

c. bahwa sebagai pedoman dan informasi menyeluruh terkait IKU Perwakilan RI Hamburg, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI Hamburg tentang Perubahan Sasaran Strategis dan IKU Perwakilan RI Hamburg dengan penjelasan komprehensif yang tertuang dalam Manual IKU Perwakilan RI Hamburg

Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri;
4. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala Perwakilan RI Hamburg Nomor 004/SK/IV/2016 tentang Revisi Rencana Strategis (Renstra) KJRI Hamburg Tahun 2015—2019;
10. Keputusan Kepala Perwakilan RI Hamburg Nomor 012/SK/VII/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hamburg Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA HAMBURG TAHUN 2018

KESATU : Mengubah sasaran strategis pada Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI Hamburg Nomor 004/SK/IV/2016 tentang Revisi Rencana Strategis (Renstra) KJRI Hamburg Tahun 2015—2019 serta indikator kinerja utama pada Surat Keputusan Perwakilan RI Nomor 012/SK/VII/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hamburg Tahun 2015-2019.

KEDUA : Memberlakukan Peta Strategi/Sasaran Strategis dan IKU Perwakilan RI Hamburg sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Perwakilan RI Hamburg Tahun 2015—2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Peta Strategi dan IKU tersebut digunakan sebagai tolak ukur kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Perwakilan RI Hamburg dan acuan dalam dokumen perencanaan kinerja dan anggaran serta evaluasi kinerja dan anggaran Perwakilan RI Hamburg.

KEEMPAT : Memberlakukan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan RI Hamburg sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai dokumen acuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perwakilan RI Hamburg.

KELIMA : Memerintahkan kepada seluruh Fungsi di lingkungan Perwakilan RI Hamburg untuk:

a. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja IKU di lingkungan Perwakilan RI sekurang-kurangnya pada setiap triwulan.

b. Menyiapkan data target, realisasi, capaian, serta informasi kinerja yang memadai bagi penanggung jawab atau pihak penyedia data yang memiliki kontribusi atas IKU Perwakilan RI Hamburg dan Kementerian Luar Negeri.

KEENAM : Manajer Kinerja Perwakilan bersama-sama dengan seluruh unsur Perwakilan RI memantau dan mengevaluasi realisasi serta capaian kinerja IKU Perwakilan RI bersama Kepala Perwakilan RI sekurang-kurangnya pada setiap triwulan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Sasaran Strategis pada Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI Hamburg Nomor 004/SK/IV/2016 tentang Revisi Rencana Strategis (Renstra) KJRI Hamburg Tahun 2015—2019 serta Indikator Kinerja Utama pada Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI Hamburg Nomor 012/SK/VII/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hamburg Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan tetap berlaku sampai dikeluarkan Keputusan yang mencabutnya.

Ditetapkan di Hamburg
Pada tanggal 31 Mei 2018
KEPALA PERWAKILAN RI

Dr. Bambang Susanto
Konsul Jenderal RI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN RI
NOMOR
TENTANG PERUBAHAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 PERWAKILAN RI HAMBURG

LAMPIRAN I:

PETA STRATEGI
KONSULAT JENDERAL RI DI HAMBURG

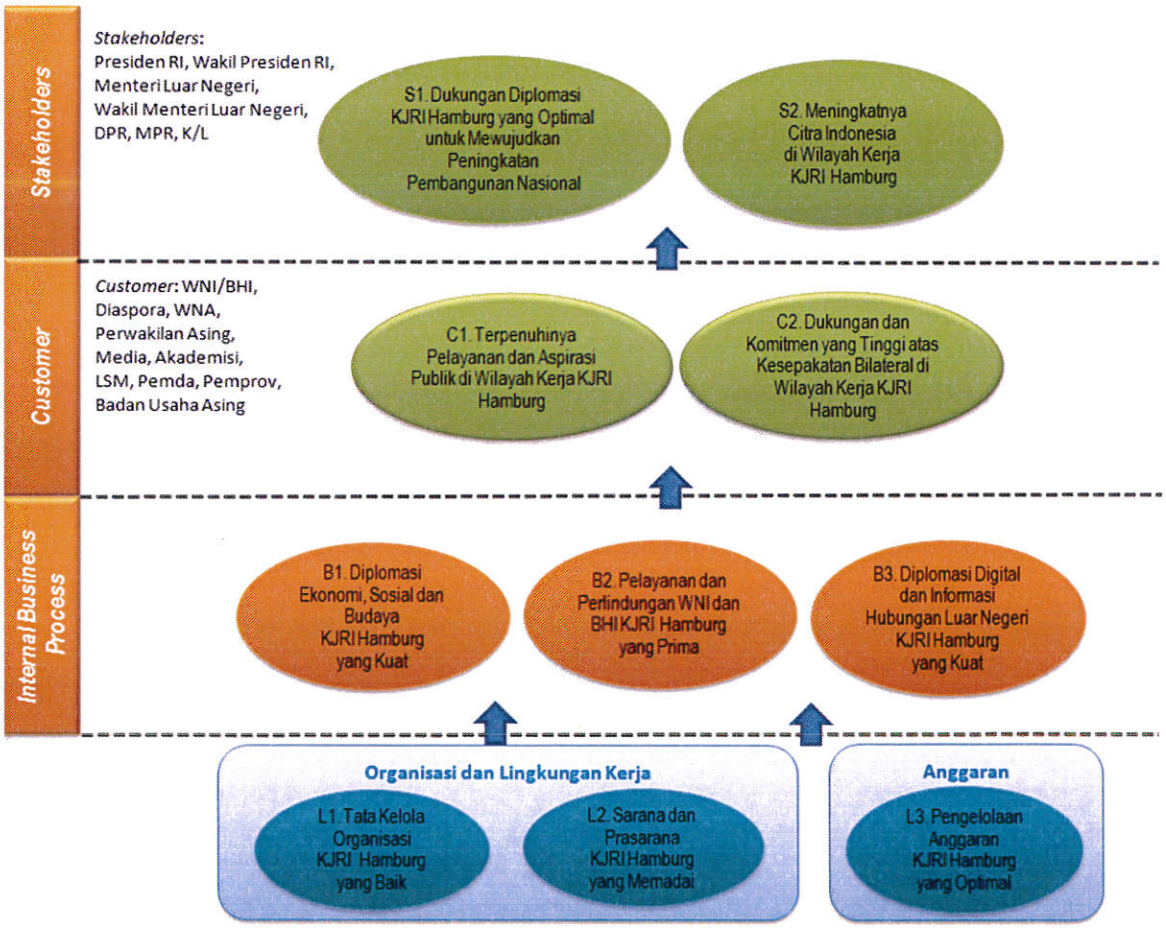

LAMPIRAN II:

MATRIKS PROYEKSI TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA KJRI HAMBURG TAHUN 2018—2022

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Stakeholder Perspective								
S.1	Dukungan Diplomasi KJRI Hamburg yang Optimal untuk Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Nasional	IKU S.1.1	Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia dengan Wilayah Kerja KJRI Hamburg	2%	2.1%	2.2%	2.3%	2.4%
		IKU S.1.2	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Asing ke Indonesia dari Wilayah Kerja KJRI Hamburg	2%	2%	2.1%	2.1%	2.2%
		IKU S.1.3	Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia dari Wilayah Kerja KJRI Hamburg	5%	7%	9%	11%	13%
S.2	Meningkatnya Citra Indonesia di Wilayah Kerja KJRI Hamburg	IKU S.2.1	Indeks Citra Indonesia di Wilayah Kerja KJRI Hamburg	4 (skala 5)	4.2	4.4	4.6	4.8
Customer Perspective								
C.1	Terpenuhinya Pelayanan dan Aspirasi Publik di Wilayah Kerja KJRI Hamburg	IKU C1.1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KJRI Hamburg	4 (skala 4)	4	4	4	4
		IKU C2.2	Indeks Kepuasan Pelayanan Perlindungan WNI/BHI KJRI Hamburg	4 (skala 4)	4	4	4	4
C.2	Dukungan dan Komitmen yang Tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Wilayah Kerja KJRI Hamburg	IKU C.2.1	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Wilayah Kerja KJRI Hamburg	80%	82%	84%	86%	88%

Internal Business Process Perspective								
B.1	Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya KJRI Hamburg yang Kuat	IKU B.1.1	Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya	2	3	3	4	4
		IKU B.1.2	Persentase Komponen *Data Economic Intelligence* yang Dipenuhi KJRI Hamburg	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU B.1.3	Persentase respon positif pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia dan asing oleh Perwakilan RI	80%	82%	84%	86%	88%
B.2	Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI KJRI Hamburg yang Prima	IKU B.2.1	Persentase Kasus Khusus yang Diselesaikan KJRI Hamburg	75%	75%	75%	75%	75%
		IKU B.2.2	Persentase Kasus Umum yang Diselesaikan KJRI Hamburg	90%	90%	90%	90%	90%
B.3	Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri KJRI Hamburg yang Kuat	IKU B.3.1	Persentase Peningkatan Impresi dan *Engagement* pada Media Sosial KJRI Hamburg	10%	15%	15%	20%	20%
Learning and Growth Perspective								
L.1	Tata Kelola Organisasi KJRI Hamburg yang Baik	IKU L.1.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KJRI Hamburg	76 (BB)	78 (BB)	80 (BB)	82 (A)	84 (A)
L.2	Sarana dan Prasarana KJRI Hamburg yang Memadai	IKU L.2.1	Persentase Sarana dan Prasarana KJRI Hamburg yang Dipenuhi Sesuai dengan Rencana	100%	100%	100%	100%	100%
L.3	Pengelolaan Anggaran KJRI Hamburg yang Optimal	IKU L.3.1	Persentase Realisasi Anggaran KJRI Hamburg	100%	100%	100%	100%	100%

LAMPIRAN III

Format Lembar Penetapan Manual IKU

LEMBAR PENETAPAN
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bersama ini ditetapkan manual IKU Konsul Jenderal RI Hamburg untuk periode Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang meliputi:

a. Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia dengan Wilayah Kerja KJRI Hamburg

b. Persentase Peningkatan Nilai Investasi Asing ke Indonesia dari Wilayah Kerja KJRI Hamburg

c. Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia dari Wilayah Kerja KJRI Hamburg

d. Indeks Citra Indonesia di Wilayah Kerja KJRI Hamburg

e. Indeks Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KJRI Hamburg

f. Indeks Kepuasan Pelayanan Perlindungan WNI/BHI KJRI Hamburg

g. Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Wilayah Kerja KJRI Hamburg

h. Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya

i. Persentase Komponen Data *Economic Intelligence* yang Dipenuhi KJRI Hamburg

j. Persentase respon positif pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia dan asing oleh Perwakilan RI

k. Persentase Kasus Khusus yang Diselesaikan KJRI Hamburg

l. Persentase Kasus Umum yang Diselesaikan KJRI Hamburg

m. Persentase Peningkatan Impresi dan *Engagement* pada Media Sosial KJRI Hamburg

n. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KJRI Hamburg

o. Persentase Sarana dan Prasarana KJRI Hamburg yang Dipenuhi Sesuai dengan Rencana

p. Persentase Realisasi Anggaran KJRI Hamburg

Ditetapkan di Hamburg, 31 Mei 2018

Manajer Kinerja Perwakilan	Kepala Perwakilan RI
Anat Widagdo	Dr. Bambang Susanto
NIP. 19841217 201012 1 001	Konsul Jenderal RI

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

S1

Perspektif: *Stakeholders Perspective*

Sasaran Strategis: Dukungan Diplomasi KJRI Hamburg yang Optimal untuk Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Nasional

Deskripsi Sasaran Strategis:

Dukungan diplomasi adalah kontribusi, peran, sumbangan diplomasi dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.
Optimal adalah paling baik; tertinggi; dan paling menguntungkan.
Peningkatan pembangunan nasional adalah nilai manfaat ekonomi ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antara negara.

Latar belakang:
Sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Perwakilan RI dan amanat Presiden RI, capaian kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air.

Indikator Kinerja Utama: **IKU-1 Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia dengan Wilayah Kerja KJRI Hamburg**

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Persentase Peningkatan: kenaikan nilai perdagangan dari tahun sebelumnya sesuai target yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri.
Wilayah Kerja adalah tempat kedudukan RI beserta negara/wilayah kerja rangkapan serta organisasi internasional yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah RI.
Nilai Perdagangan: Nilai ekspor Indonesia ditambah dengan nilai impor (Barang dan jasa) Indonesia yang diperoleh dari Kemendag atau BPS.

Formula:

$$\frac{\text{(Data Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara Wilayah kerja Periode saat ini - Data Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara Wilayah kerja Periode tahun sebelumnya)}}{\text{Data Nilai Perdagangan Indonesia dengan Wilayah kerja Periode tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Tujuan:

Sesuai dengan visi misi Presiden yang mengedepankan diplomasi ekonomi, Kemenlu bertekad untuk meningkatkan peran Perwakilan RI guna memberikan kontribusi lebih intensif kepada upaya peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara akreditasi melalui berbagai macam kegiatan promosi dagang, dll.

Satuan Pengukuran :	Persentase
Tingkat Kendali IKU :	( ) High **(X) Moderate** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU :	**(X) Exact** ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Ekonomi dan ITPC
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Ekonomi dan ITPC
Sumber Data :	Diutamakan Nilai Perdagangan yang diterbitkan oleh Kemendag atau BPS (jika data utama tidak ada, maka dapat menggunakan data dari lembaga statistik resmi di negara akreditasi/wilayah kerja dengan dikonversi dalam mata uang USD).
Jenis Cascading IKU:	**(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non peta ( ) Non-Cascading
Metode Cascading :	( ) Direct **(X) Indirect**
Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum ( ) Average **(X) Take Last Known Value**
Jenis Konsolidasi Lokasi :	( ) Sum ( ) Average **(X) Raw data**
Polarisasi Indikator Kinerja :	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2016		2017		2018
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	2%

Indikator Kinerja Utama:	**IKU-2 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Asing ke Indonesia dari Wilayah Kerja KJRI Hamburg**

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Persentase Peningkatan: persentase peningkatan dari tahun sebelumnya sesuai target yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri.
Wilayah Kerja adalah tempat kedudukan RI beserta negara/wilayah kerja rangkapan serta organisasi internasional yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah RI.
Nilai Investasi Asing: Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia dalam kurun waktu satu tahun yang diperoleh dari data BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Formula:

$$\frac{\text{(Data Nilai investasi Asing ke Indonesia dari Wilayah Kerja KJRI Hamburg Periode saat ini - Data Nilai investasi Asing ke Indonesia dari Wilayah Kerja KJRI Hamburg Periode tahun sebelumnya)}}{\text{Data Nilai investasi Asing ke Indonesia dari Wilayah Kerja KJRI Hamburg Periode tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Tujuan:

Sesuai dengan visi misi Presiden yang mengedepankan diplomasi ekonomi, Kemenlu bertekad untuk meningkatkan peran Perwakilan RI guna memberikan kontribusi lebih intensif kepada upaya peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia.

Satuan Pengukuran :	Persentase
Tingkat Kendali IKU :	( ) High **(X) Moderate** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU :	**(X) Exact** ( ) Proxy ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Ekonomi, IIPC dan Atase Teknis Terkait Lainnya
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Ekonomi, IIPC
Sumber Data :	Diutamakan Data Publikasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan instansi/lembaga terkait dengan penanaman modal di negara akreditasi (jika data utama tidak ada, maka dapat menggunakan data dari lembaga statistik resmi di negara akreditasi/wilayah kerja dengan dikonversi dalam mata uang USD).
Jenis Cascading IKU:	**(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non peta ( ) Non-Cascading
Metode Cascading :	( ) Direct **(X) Indirect**
Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum ( ) Average **(X) Take Last Known Value**
Jenis Konsolidasi Lokasi :	( ) Sum ( ) Average **(X) Raw data**
Polarisasi Indikator Kinerja :	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2016		2017		2018
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	2%

Indikator Kinerja Utama:	**IKU-3 Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia dari Wilayah Kerja KJRI Hamburg**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	**Definisi:** **Persentase Peningkatan**: penambahan jumlah dari tahun sebelumnya sesuai target yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri. **Wilayah Kerja** adalah tempat kedudukan RI beserta negara/wilayah kerja rangkapan serta organisasi internasional yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah RI. **Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia**: Jumlah total Warga dari negara asing yang mengadakan perjalanan wisata ke Indonesia. Data didapatkan melalui Badan Pusat Statistik atau Kementerian Pariwisata. **Formula:** $\frac{\text{(Data wisatawan mancanegara dari Wilayah kerja Periode saat ini - Data wisatawan mancanegara dari Wilayah kerja Periode yang lalu)}}{\text{Data wisatawan mancanegara dari Wilayah kerja Periode yang lalu}} \times 100\%$ **Tujuan:** Sesuai dengan visi misi Presiden yang mengedepankan diplomasi ekonomi, Kemenlu bertekad untuk meningkatkan peran Perwakilan RI guna memberikan kontribusi lebih intensif kepada upaya peningkatan nilai wisatawan asing ke Indonesia melalui berbagai macam kegiatan promosi budaya, pariwisata, kuliner, dll.
Satuan Pengukuran :	persentase
Tingkat Kendali IKU :	( ) High **(X) Moderate** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU :	**(X) Exact** ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pensosbud
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pensosbud

Sumber Data :	Data Publikasi oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata, Ditjen Imigrasi			
Jenis Cascading IKU:	**(X) Cascading Peta**	( ) Cascading Non peta	( ) Non-Cascading	
Metode Cascading :	( ) Direct	**(X) Indirect**		
Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum	( ) Average	**(X) Take Last Known Value**	
Jenis Konsolidasi Lokasi :	( ) Sum	( ) Average	**(X) Raw data**	
Polarisasi Indikator Kinerja :	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	**(X) Tahunan**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2016		2017		2018
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	5%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

S2

Perspektif: *Stakeholders Perspective*

Sasaran Strategis: Meningkatnya Citra Indonesia di Wilayah Kerja KJRI Hamburg

Deskripsi Sasaran Strategis:

Citra Indonesia adalah persepsi yang dipercayai/diyakini aktor lain terhadap Indonesia yang didasarkan kepada pola perilaku yang ditunjukkan Indonesia dalam pergaulan internasional, pola perilaku tersebut terbangun berdasarkan power yang dimiliki baik yang bersifat hard maupun soft, citra dalam hal ini dapat bersifat positif maupun negatif)

Negara Akreditasi/wilayah kerja adalah tempat kedudukan Perwakilan RI beserta negara/wilayah kerja rangkapan serta organisasi internasional yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI.

Citra sebuah negara berkaitan dengan identitas nasional yang dimiliki dan digunakan sebagai aset yang dapat dikelola dan digunakan dalam hal-hal yang bersifat strategis. dalam mengukur citra sebuah negara dapat diukur melalui 6 dimensi utama yaitu: pariwisata, export, tata kelola pemerintahan, investasi dan imigrasi, budaya dan masyarakat. (lihat Nadia Kaneva, 2011, "Nation Branding: Toward an Agenda for Critical Research, dalam International Journal of Communication Vol 5 (2011), 117-141)

Latar belakang:
Citra merupakan salah satu dampak akhir yang terbentuk dari suatu usaha diplomasi ataupun kebijakan luar negeri yang diambil. Citra positif adalah hal yang perlu dibangun oleh Indonesia di mata dunia internasional. Adanya citra positif yang terbentuk akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional, sehingga dapat menempatkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang positif dalam berbagai aspek kehidupan. Faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap citra meliputi isu-isu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, oleh karena itulah isu-isu tersebut harus dapat dikelola dengan baik oleh Indonesia. Isu-isu yang ada kemudian akan disebarkan oleh media informasi sebagai alat penyebar berita kepada publik. Pemberitaan positif dan negatif tentunya akan berpengaruh terhadap mindset publik terhadap Indonesia, sehingga strategi dalam mengelola dan menangani media perlu dilakukan oleh Indonesia.

Indikator Kinerja Utama: **IKU 1: Indeks Citra Indonesia di Wilayah Kerja KJRI Hamburg**

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Indeks Citra: Indeks yang mengukur kesan ataupun pandangan masyarakat internasional terhadap negara Indonesia di negara akreditasi KJRI Hamburg. Indeks citra positif Indonesia diukur dengan menggunakan kuesioner dengan pendekatan Anholt skala 0 s/d 5. Survey dilakukan dengan alternatif versi manual dan online. Responden untuk mengukur indeks Citra Indonesia adalah masyarakat internasional yang bukan warganegara Indonesia.

Ruang lingkup
Diukur melalui 6 dimensi utama yaitu: Tata Kelola Pemerintahan, Ekspor, Pariwisata, Investasi dan Imigrasi, Warisan Budaya, dan Kemasyarakatan (Anholt). Pola dan isi kuesioner dikoordinir instruksi terpusat dari Pusat.

Interval	Kategori Indeks	Skala Indeks
0 - 16,67	Sangat Buruk	0
16,68 - 35,35	Buruk	1
35,36 - 50,01	Cukup Buruk	2
50,02 - 66,68	Cukup Baik	3
66,69 - 83,35	Baik	4
83,36 - 100	Sangat Baik	5

Formula:

Indeks hasil survei terhadap citra Indonesia

Tujuan:

Untuk mengukur sampai sejauh mana citra positif Indonesia di negara akreditasi/wilayah kerja

Satuan Pengukuran :	Indeks			
Tingkat Kendali IKU :	( ) High	( ) Moderate	**(X) Low**	
Tingkat Validitas IKU :	**(X) Exact**	( ) Proxy	( ) Activity	
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Pensosbud			
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Pensosbud			
Sumber Data :	Hasil olah data kuesioner indeks citra Indonesia			
Jenis Cascading IKU:	**(X) Cascading Peta**	( ) Cascading Non peta	( ) Non-Cascading	
Metode Cascading :	( ) Direct	**(X) Indirect**		
Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum	( ) Average	**(X) Take Last Known Value**	
Jenis Konsolidasi Lokasi :	( ) Sum	( ) Average	**(X) Raw data**	
Polarisasi Indikator Kinerja :	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	**(X) Tahunan**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2016		2017		2018
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	4 (Skala 5)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

Perspektif:	*Customer Perspective*
Sasaran Strategis:	Terpenuhinya Pelayanan dan Aspirasi Publik di Wilayah Kerja KJRI Hamburg
Deskripsi Sasaran Strategis:	**Pemenuhan pelayanan Publik** adalah tindakan yang dilakukan oleh Perwakilan RI dalam rangka memenuhi dan mengakomodasi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang baik. **Latar Belakang:** Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat (WNI & WNA) merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (*public services*) sangat strategis karena akan menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis seiring dengan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari *empowering* yang dialami oleh masyarakat. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.
Indikator Kinerja Utama:	**IKU-1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KJRI Hamburg**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	**Definisi:** **Kepuasan pelayanan** adalah kondisi dimana pelayanan yang diterima sesuai dan/atau lebih baik daripada yang diharapkan oleh penerima jasa **Kekonsuleran** adalah kegiatan yang meliputi pengurusan surat perjalanan Republik Indonesia, visa non diplomatik, legalisasi, penerbitan surat terkait kependudukan dan catatan sipil, termasuk layanan konsultasi kekonsuleran, dokumen ketenagakerjaan, buku pelaut. Hasil penilaian kuesioner/survey yang diambil merupakan hasil penilaian rata - rata dari survey per periode. **Ruang Lingkup:** Responden: setiap orang/pihak yang menerima pelayanan jasa kekonsuleran. **Kuesioner yang digunakan menggunakan skala 1-4:** Skala 1: Sangat Tidak Puas Skala 2: Tidak Puas Skala 3: Puas Skala 4 : Sangat Puas **Formula:** **Hasil Survei/Kuesioner Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran** **Tujuan:** untuk mengetahui kualitas pelayanan kekonsuleran di Perwakilan KJRI Hamburg
Satuan Pengukuran :	Indeks
Tingkat Kendali IKU :	( ) High **(X) Moderate** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU :	**(X) Exact** ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Konsuler Perwakilan RI
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Konsuler Perwakilan RI
Sumber Data :	Hasil survey/olah kuesioner kepuasan pelayanan kekonsuleran perwakilan
Jenis Cascading IKU:	**(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non peta ( ) Non-Cascading

Metode Cascading :	( ) Direct	**(X) Indirect**		
Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum	**(X) Average**	( ) Take Last Known Value	
Jenis Konsolidasi Lokasi :	( ) Sum	( ) Average	**(X) Raw data**	
Polarisasi Indikator Kinerja :	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan	(**X**) Triwulanan	( ) Semesteran	( ) Tahunan

Periode Pelaporan	2016		2017		2018
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	4 (Skala 4)
s.d TRIWULAN I	N/A	N/A	N/A	N/A	4 (Skala 4)
s.d TRIWULAN II	N/A	N/A	N/A	N/A	4 (Skala 4)
s.d TRIWULAN III	N/A	N/A	N/A	N/A	4 (Skala 4)
s.d TRIWULAN IV	N/A	N/A	N/A	N/A	4 (Skala 4)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

C2

Perspektif:	*Customer Perspective*
Sasaran Strategis:	Dukungan dan Komitmen yang Tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Wilayah Kerja KJRI Hamburg
Deskripsi Sasaran Strategis:	**Dukungan** adalah sokongan/bantuan. **Komitmen** adalah (upaya) perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu. **Tinggi** adalah (mendukung) secara penuh. **Kesepakatan kerja sama bilateral** adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh 2 negara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Kesepakatan kerjasama bilateral melingkupi kesepakatan internasional yang merupakan perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. **Latar belakang:** Pada tingkat bilateral serta forum-forum regional dan multilateral terdapat kesepakatan-kesepakatan yang disetujui bersama oleh Indonesia dan negara-negara lain. Kesepakatan tersebut perlu diimplementasikan agar dapat dirasakan kemanfaatannya oleh rakyat.
Sub Indikator Kinerja Utama:	**IKU-1 Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Wilayah Kerja KJRI Hamburg**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	**Definisi:** **Tindaklanjut/implementasi:** Tindakan yang diambil untuk langkah-langkah selanjutnya/pelaksanaan, penerapan oleh stakeholder terkait baik di negara Indonesia maupun di negara akreditasi. **Kesepakatan kerja sama bilateral**: perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh 2 negara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. **Wilayah kerja** : tempat kedudukan Perwakilan RI wilayah kerja rangkapan dan organisasi internasional yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI. **Formula:** $\frac{\textbf{Jumlah kesepakatan bilateral yang ditindaklanjuti/diimplementasikan}}{\textbf{Jumlah total kesepakatan bilateral Indonesia dengan Wilayah kerja beserta negara rangkapan}} \times 100\%$ **Tujuan:** Mengukur kesepakatan bilateral Indonesia dengan Wilayah Kerja KJRI Hamburg yang ditindaklanjuti
Satuan Pengukuran :	Persentase
Tingkat Kendali IKU :	( ) High **(X) Moderate** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU :	( ) Exact **(X) Proxy** ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Politik, Ekonomi, Pensosbud dan Protokol Konsuler
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Politik, Ekonomi, Pensosbud dan Protokol Konsuler

Sumber Data :	Rekapitulasi dokumen dari tindak lanjut kesepakatan berdasarkan laporan pertemuan/kegiatan, brafaks perwakilan, surat dari/kepada K/L teknis, pernyataan pers, liputan media, pidato pejabat, website *treaty room*
Jenis Cascading IKU:	**(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non peta ( ) Non-Cascading
Metode Cascading :	( ) Direct **(X) Indirect**
Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum ( ) Average **(X) Take Last Known Value**
Jenis Konsolidasi Lokasi :	( ) Sum ( ) Average **(X) Raw data**
Polarisasi Indikator Kinerja :	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan **(X) Triwulanan** ( ) Semesteran ( ) Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2016			2017			2018
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%
s.d TRIWULAN 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d TRIWULAN 2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d TRIWULAN 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d TRIWULAN 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

B1

Perspektif:	*Business Process*
Sasaran Strategis:	Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya KJRI Hamburg yang Kuat
Deskripsi Sasaran Strategis:	**Diplomasi ekonomi** adalah adalah aktivitas diplomasi untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi melalui berbagai kerja sama seperti perdagangan, investasi, energi, perhubungan, pariwisata, pertanian, perikanan, perindustrian, keuangan, perpajakan, kerja sama ekonomi teknik. Negara Akreditasi/wilayah kerja adalah tempat kedudukan Perwakilan RI beserta negara akreditasi/wilayah kerja dan organisasi internasional yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI. Diplomasi sosial adalah aktivitas diplomasi untuk mencapai tujuan-tujuan sosial melalui berbagai kerja sama seperti pembangunan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Diplomasi budaya adalah aktivitas diplomasi untuk mencapai tujuan-tujuan pelestarian dan pengenalan budaya Indonesia kepada dunia internasional, dengan penggunaan aset budaya nasional untuk mendukung pemenuhan tujuan kebijakan luar negeri Indonesia. Kuat adalah mempunyai keunggulan untuk bersaing dengan negara lain.
Indikator Kinerja Utama:	**IKU-1 Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	**Definisi:** **Kesepakatan** adalah hasil kesepakatan pada setiap proses perundingan di bidang ekonomi, sosial dan budaya **Ruang lingkup kesepakatan bidang ekonomi mencakup antara lain:** perdagangan, investasi, energi, perhubungan, pariwisata, pertanian, perikanan, perindustrian, keuangan, perpajakan, kerja sama ekonomi teknik **Ruang lingkup kesepakatan bidang sosial mencakup antara lain:** kesejateraan, kesehatan dan pendidikan **Ruang lingkup kesepakatan bidang budaya antara lain**: pertukaran budaya, pelestarian aset-aset budaya **Batas waktu:** **Formula:** **Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 2018** **Tujuan:** mengukur sejauh mana diplomasi ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan telah dijalankan dengan efektif dan berkualitas
Satuan Pengukuran :	Jumlah
Tingkat Kendali IKU :	( ) High **(X) Moderate** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU :	( ) Exact **(X) Proxy** ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pensosbud
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pensosbud

Sumber Data :	Records of Discussion (RoD), Naskah Kesepakatan, Diplomatic Notes, Joint Statement, Declaration, Joint Communique, Letter of Intent, Chairman's Note, Memorandum of Understanding, Exchange of Notes, Summary Record, Agreed Minutes, Treaty, Minutes of Meeting, Laporan Perwakilan RI, Database kebijakan perdagangan.
Jenis Cascading IKU:	**(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non peta ( ) Non-Cascading
Metode Cascading :	( ) Direct **(X) Indirect**
Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum ( ) Average **(X) Take Last Known Value**
Jenis Konsolidasi Lokasi :	**(X) Sum** ( ) Average ( ) Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja :	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan **(X) Triwulanan** ( ) Semesteran ( ) Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2016		2017		2018
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	2
s.d TRIWULAN I	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d TRIWULAN II	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d TRIWULAN III	N/A	N/A	N/A	N/A	1
s.d TRIWULAN IV	N/A	N/A	N/A	N/A	2

Indikator Kinerja Utama:	**IKU-2 Persentase Komponen Data Economic Intelligence yang Dipenuhi KJRI Hamburg**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	**Definisi:**

Latar Belakang:
Dalam menjalankan diplomasi ekonomi, Perwakilan RI harus mencermati potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing negara yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.

Definisi:
Negara akreditasi/wilayah akreditasi adalah tempat kedudukan RI beserta negara/wilayah kerja rangkapan serta organisasi internasional yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah RI.

Memiliki adalah menyusun dan memutakhirkan secara berkala setiap tahun.

Data economic intelligence adalah informasi dan kajian hasil analisis di bidang ekonomi (perdagangan, keuangan, investasi, pariwisata, dan jasa) yang bersifat strategis bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap negara/wilayah akreditasi. Data economic intelligence disusun dan dimutakhirkan secara berkala setiap tahun dari masing-masing negara/wilayah kerja dan rangkapannya, jika ada. Contoh: KJRI Melbourne menyusun dua data economic intelligence untuk Negara Bagian Victoria dan Negara Bagian Tazmania.

Ruang lingkup data economic intelligence adalah sebagaimana disampaikan dalam berita rahasia Sekretaris Jenderal No R-05749/KEMLU/160929 dengan cakupan komponen informasi sebagai berikut:
1. Gambaran Umum Ekonomi Negara Akreditasi/Wilayah Kerja
2. Kebijakan Ekonomi di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja
3. Kiat Mengembangkan Bisnis di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja
4. Prospek ekonomi dan bisnis di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja yang meliputi: Perdagangan, Perdagangan, Investasi, Pariwisata, Jasa dan kerja sama Keuangan dan Pembangunan
5. Kontak Informasi Bisnis

FORMAT DATA ECONOMIC INTELLIGENCE PERWAKILAN RI :

I. Kata Pengantar

II. Daftar Isi

III. Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan serta ruang lingkup dari penyusunan Data Economic Intelligence.

IV. Gambaran Umum Ekonomi Negara Akreditasi / Wilayah Kerja

- Menjelaskan kondisi umum perekonomian negara akreditasi / wilayah kerja dan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi aktivitas ekonomi dan iklim bisnis seperti stabilitas politik, keamanan dan budaya, serta dilengkapi dengan data sejumlah indikator ekonomi makro seperti laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, laju inflasi, budget/anggaran belanja pemerintah, defisit anggaran, tingkat pengangguran, nilai tukar, dan tingkat suku bunga dalam bentuk chart atau tabel.
- Bagi Konsulat dan Konsulat Jenderal yang memiliki informasi spesifik kondisi perekonomian di wilayah kerjanya dapat memberikan masukan untuk melengkapi informasi gambaran umum ekonomi negara akreditasi.
- Sebagai bahan rujukan dalam peningkatan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara akreditasi / wilayah kerja, agar dicantumkan informasi mengenai kesepakatan/perjanjian kerja sama ekonomi yang telah ditandatangani.

V. Kebijakan Ekonomi di Negara Akreditasi / Wilayah Kerja

Menjelaskan kebijakan ekonomi yang diberlakukan di negara akreditasi / wilayah kerja, temasuk regulasi terkait dengan insentif ekonomi dan bisnis di sektor perdagangan (barang dan jasa), investasi, pariwisata, jasa skilled worker dan jasa lainnya; akses pasar (barang dan jasa), regulasi yang bersifat protektif antara lain kebijakan substitusi impor, hambatan tarif dan non tarif, regulasi jasa serta kebijakan perbankan dan kepabeanan.

Bagi Konsulat dan Konsulat Jenderal yang memiliki informasi spesifik kebijakan ekonomi di wilayah kerjanya dapat memberikan masukan untuk melengkapi informasi kebijakan ekonomi yang berlaku di tingkat nasional negara akreditasi.

VI. Kiat Mengembangkan Bisnis di Negara Akreditasi / Wilayah Kerja

Menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengembangan bisnis ke negara akreditasi / wilayah kerja, seperti budaya bisnis, regim keuangan/perbankan yang berlaku, sistem pembayaran, prosedur ekspor impor, proses pembukaan kantor perwakilan dagang atau cabang usaha swasta, prosedur investasi, dan strategi menjalin kemitraan antar tour operator.

VII. Prospek Ekonomi dan Bisnis di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja

VII.1. Perdagangan

a. Produk impor dan ekspor utama negara akreditasi, dengan dilengkapi data statistik minimal 3 tahun terakhir dari otoritas setempat.
b. Negara importir dan tujuan ekspor utama, dengan dilengkapi data statistik minimal 3 tahun terakhir dari otoritas setempat.
c. Peringkat perdagangan Indonesia di negara akreditasi dibandingkan dengan negara pesaing utama, termasuk negara ASEAN selama minimal 3 tahun terakhir.
d. Analisis jenis produk perdagangan yang potensial untuk dikembangkan, termasuk kondisi pangsa pasar, harga produk dan negara pesaing/kompetitor, ketentuan sertifikasi/standar kualitas produk yang harus dipenuhi serta kiat/strategi bisnis yang perlu diperhatikan/dilakukan pelaku usaha Indonesia, seperti menjalin kemitraan atau mengikuti promosi, saluran distribusi dan target pasar.

VII.2 Investasi

a. Sektor investasi terbuka dan tertutup (negative list) di negara akreditasi .
b. Negara investor utama di negara akreditasi dan negara tujuan investasi utama, dengan dilengkapi data statistik nilai/proyek investasi minimal 3 tahun terakhir dari otoritas setempat.
c. Analisis sektor investasi potensial untuk dikembangkan, baik di negara akreditasi ataupun di Indonesia, investor pesaing/ kompetitor, ketentuan khusus yang berlaku pada sektor investasi potensial, perlindungan terhadap investor dan kemungkinan resiko yang perlu diantisipasi (jika ada), serta kiat menarik pengusaha di negara akreditasi berinvestasi di Indonesia.

VII.3 Pariwisata

a. Negara asal dan tujuan wisata utama, dengan dilengkapi data statistik dan trend minimal 3 tahun terakhir.
b. Karakteristik produk wisata yang diminati dan telah dijual negara pesaing kepada wisatawan dari negara akreditasi, seperti produk wisata alam, budaya, sejarah, religi, kuliner, dan belanja.
c. Karakteristik turis yang mendatangi tempat wisata (jika ada).
d. Potensi pembukaan jalur penerbangan Indonesia dengan negara akreditasi / wilayah kerja (jika ada).
e. Analisis jenis produk wisata potensial untuk dikembangkan, termasuk upaya pengembangan paket wisata bersama, strategi promosi untuk menarik wisatawan dari negara akreditasi ke Indonesia.

VII.4 Jasa
a. Jenis jasa skilled worker utama yang terdapat di pasar tenaga kerja negara akreditasi / wilayah kerja, dengan dilengkapi data statistik dan trend minimal 3 tahun terakhir.
b. Negara asal skilled worker utama yang terdapat di negara akreditasi / wilayah kerja dengan dilengkapi data statistik dan trend minimal 3 tahun terakhir.
c. Jenis skilled worker asal Indonesia yang terdapat di negara akreditasi / wilayah kerja dengan dilengkapi data statistik dan trend minimal 3 tahun terakhir.
d. Analisis peluang kerja sektor skilled worker di negara akreditasi / wilayah kerja yang potensial bagi Indonesia serta skala penghasilannya.

VII.5. Kerja sama Keuangan dan Pembangunan (jika ada)
a. Bentuk skema pendanaan dan kerja sama pembangunan yang diberikan negara akreditasi / wilayah kerja kepada lembaga/ negara lain dengan dilengkapi data statistik dan trend minimal 3 tahun terakhir.
b. Lembaga/Negara penerima fasilitas/skema pendanaan pembangunan dari negara akreditasi / wilayah kerja.
c. Potensi pendanaan yang dapat dimanfaatkan Indonesia dan ruang lingkup sektor ekonomi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh sumber pendanaan dari negara akreditasi / wilayah kerja.

VIII. Kontak Informasi Bisnis
Menginformasikan daftar contact person dan alamat pihak-pihak terkait (Instansi Pemerintah, Kadin, Asosiasi Pengusaha, Bank Koresponden) di negara akreditasi / wilayah kerja.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah komponen data economic intelligence yang dipenuhi}}{\text{Jumlah total komponen yang harus dipenuhi sesuai format}} \times 100\%$$

Tujuan:

Mengukur tingkat pemenuhan komponen data *economic intelligence* /hasil survei pasar dalam rangka mencapai tujuan diplomasi ekonomi

Satuan Pengukuran :	Persentase			
Tingkat Kendali IKU :	( ) High	**(X) Moderate**	( ) Low	
Tingkat Validitas IKU :	( ) Exact	**(X) Proxy**	( ) Activity	
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Ekonomi			
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Ekonomi			
Sumber Data :	Data Economic Intelligence			
Jenis Cascading IKU:	( ) Cascading Peta	( ) Cascading Non peta	**(X) Non-Cascading**	
Metode Cascading :	( ) Direct	( ) Indirect		
Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum	( ) Average	**(X) Take Last Known Value**	
Jenis Konsolidasi Lokasi :	( ) Sum	( ) Average	( ) Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja :	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	**(X) Tahunan**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2016		2017		2018
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

Indikator Kinerja Utama:	**IKU-3 Persentase respon positif pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia dan asing oleh Perwakilan RI**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	**Definisi:** **Pembinaan masyarakat** adalah upaya/proses membina dan mengumpulkan masyarakat di negara akreditasi dan negara rangkapan untuk berpartisipasi dalam mendukung kepentingan nasional Indonesia. **Pemberdayaan** adalah melakukan pengumpulan terhadap kemampuan yang sangat mungkin dikembangkan menjadi potensi yang lebih baik dan bermanfaat **Masyarakat** adalah WNI di luar negeri, keturunannya, dan orang yang memiliki darah Indonesia yang terdapat di wilayah Negara Akreditasi/Wilayah kerja. **Respons Positif**: Pernyataan tertulis dalam kuesioner yang mengindikasikan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia dan asing oleh Perwakilan RI yang dilaksanakan bermanfaat. Pernyataan tersebut diperoleh dari responden masyarakat Indonesia dan asing atas setiap pembinaan dan pemberdayaan. **Formula:** $\frac{\text{(Jumlah masyarakat Indonesia yang memberikan respons positif atas pembinaan dan pemberdayaanKJRI Hamburg + Jumlah masyarakat asing yang memberikan respons positif atas pembinaan dan pemberdayaan KJRI Hamburg)}}{\text{(Jumlah responden masyarakat Indonesia yang mengembalikan kuesioner + Jumlah responden masyarakat asing yang mengembalikan kuesioner)}}$ **X 100%** **Tujuan:** Untuk mengukur kuaitas pemberdayaan masyarakat Indonesia dan asing oleh Perwakilan RI
Satuan Pengukuran :	Persentase
Tingkat Kendali IKU :	( ) High **(X) Moderate** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU :	( ) Exact **(X) Proxy** ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Pensosbud
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Pensosbud
Sumber Data :	Laporan hasil olah data kuesioner pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia dan asing oleh Perwakilan RI
Jenis Cascading IKU:	( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta **(X) Non-Cascading**
Metode Cascading :	( ) Direct ( ) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum ( ) Average **(X) Take Last Known Value**
Jenis Konsolidasi Lokasi :	( ) Sum ( ) Average ( ) Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja :	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan **(X) Triwulanan** ( ) Semesteran ( ) Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2016		2017		2018
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	80%
s.d TRIWULAN I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d TRIWULAN II	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d TRIWULAN III	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d TRIWULAN IV	N/A	N/A	N/A	N/A	80%

Perspektif: *Business Process*

Sasaran Strategis Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI KJRI Hamburg yang Prima

Deskripsi Sasaran Strategis:

Pelayanan adalah tindakan dalam hal pemberian bantuan, pengurusan, dan persiapan dokumen kekonsuleran, keimigrasian, ketenagakerjaan, pendidikan, dan perhubungan terkait pemberian perlindungan kepada WNI & BHI di wilayah akreditasi
Perlindungan adalah pertolongan, pembelaan, pendampingan, dan penyediaan bantuan hukum dan sosial dari Perwakilan RI di luar negeri bagi WNI dan BHI yang sedang menghadapi kasus di luar negeri.
WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara Republik Indonesia.
BHI adalah Badan Hukum yang didirikan menurut peraturan perundangan Indonesia.
Prima adalah sangat baik; utama

Ruang lingkup:
WNI dan BHI dalam hal ini adalah yang berkedudukan di luar negeri.

Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI KJRI Hamburg yang Prima mengindikasikan penanganan WNI dan BHI di luar negeri yang tepat, tuntas, transparan dan terukur. IKU SS ini ditandai dengan penyelesaian kasus WNI dan BHI di luar negeri secara:
1. Tepat dan terukur menggunakan sistem dan mekanisme penanganan kasus-kasus WNI dan BHI di luar negeri yang cepat dan komprehensif,
2. Sesuai asas transparansi, norma hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku serta tuntas dan
3. Mencapai solusi akhir sesuai dengan target penyelesaian kasus

Penghitungan jumlah kasus tidak didasarkan pada jumlah WNI/BHI, melainkan jumlah kasus yang dilaporkan. Satu orang WNI dapat mengalami beberapa kasus yang berbeda. Contohnya: pengaduan seorang WNI yang mengalami kekerasan fisik oleh majikan, gaji yang tidak dibayar, dan izin tinggal yang tidak diperpanjang. Dalam hal ini WNI tersebut memiliki 3 kasus yang berbeda. Penanganan kasus-kasus tersebut juga memiliki prosedur / SOP yang berbeda dengan target penyelesaian yang berbeda juga. Penyelesaian 3 kasus tersebut dapat terjadi tidak bersamaan karena terkait dengan pihak-pihak lain, seperti: pihak kepolisian, imigrasi, dan Kemenlu di Indonesia dan negara setempat.

Indikator Kinerja Utama: **IKU 1: Persentase Kasus Khusus yang Diselesaikan KJRI Hamburg**

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Kasus Khusus meliputi/mencakup/terdiri dari namun tidak terbatas pada kasus WNI/BHI di luar negeri yang termasuk dalam kategori high profile case (kasus hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, korban penyiksaan fisik berat, pemerkosaan, korban TPPO, kasus narkoba, evakuasi WNI (perang, bencana alam, kecelakaan pesawat/kapal laut, amnesti) serta kasus yang bersifat insidentil dan/atau massive yang memiliki ramifikasi yang cukup luas secara politis, ketertiban masyarakat, keselamatan jiwa WNI.

Kasus yang selesai adalah Kasus Khusus yang tertangani secara tuntas dan mencapai solusi akhir sesuai dengan target penyelesaian kasus, prosedur, aturan hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak WNI, kriteria/ruang lingkup kasus WNI/BHI di luar negeri.

Kasus yang ditangani adalah Kasus Khusus yang dihadapi oleh WNI di luar negeri sesuai dengan pengaduan, laporan, atau pun pemberitaan serta informasi yang diterima dari berbagai pihak, yang termasuk dalam lingkup pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.

Formula:

$$\frac{\textbf{Kasus khusus yang selesai}}{\textbf{Jumlah Kasus khusus yang ditangani}} \times 100\%$$

Tujuan:

Mengukur tingkat capaian penyelesaian kasus-kasus khusus WNI dan BHI di luar negeri

Satuan Pengukuran : Persentase

Tingkat Kendali IKU : ( ) High **(X) Moderate** ( ) Low

Tingkat Validitas IKU : **(X) Exact** ( ) Proxy ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Fungsi Konsuler Perwakilan RI

Unit/Pihak Penyedia Data : Fungsi Konsuler Perwakilan RI

Sumber Data : Laporan Penanganan Kasus, PORTAL Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri dan Berita Acara Serah Terima Penanganan Kasus

Jenis Cascading IKU: **(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non peta ( ) Non-Cascading

Metode Cascading : ( ) Direct **(X) Indirect**

Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average **(X) Take Last Known Value**

Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( ) Average **(X) Raw data**

Polarisasi Indikator Kinerja : **(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize

Periode Pelaporan : ( ) Bulanan **(X) Triwulanan** ( ) Semesteran ( ) Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2016		2017		2018
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	75%
s.d TRIWULAN I	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d TRIWULAN II	N/A	N/A	N/A	N/A	25%
s.d TRIWULAN III	N/A	N/A	N/A	N/A	50%
s.d TRIWULAN IV	N/A	N/A	N/A	N/A	75%

Perspektif: *Business Process*

Sasaran Strategis Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI KJRI Hamburg yang Prima

Deskripsi Sasaran Strategis:

Pelayanan adalah tindakan dalam hal pemberian bantuan, pengurusan, dan persiapan dokumen kekonsuleran, keimigrasian, ketenagakerjaan, pendidikan, dan perhubungan terkait pemberian perlindungan kepada WNI & BHI di wilayah akreditasi
Perlindungan adalah pertolongan, pembelaan, pendampingan, dan penyediaan bantuan hukum dan sosial dari Perwakilan RI di luar negeri bagi WNI dan BHI yang sedang menghadapi kasus di luar negeri.
WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara Republik Indonesia.
BHI adalah Badan Hukum yang didirikan menurut peraturan perundangan Indonesia.
Prima adalah sangat baik; utama

Ruang lingkup:
WNI dan BHI dalam hal ini adalah yang berkedudukan di luar negeri.

Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI KJRI Hamburg yang Prima mengindikasikan penanganan WNI dan BHI di luar negeri yang tepat, tuntas, transparan dan terukur. IKU SS ini ditandai dengan penyelesaian kasus WNI dan BHI di luar negeri secara:
1. Tepat dan terukur menggunakan sistem dan mekanisme penanganan kasus-kasus WNI dan BHI di luar negeri yang cepat dan komprehensif,
2. Sesuai asas transparansi, norma hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku serta tuntas dan
3. Mencapai solusi akhir sesuai dengan target penyelesaian kasus

Penghitungan jumlah kasus tidak didasarkan pada jumlah WNI/BHI, melainkan jumlah kasus yang dilaporkan. Satu orang WNI dapat mengalami beberapa kasus yang berbeda. Contohnya: pengaduan seorang WNI yang mengalami kekerasan fisik oleh majikan, gaji yang tidak dibayar, dan izin tinggal yang tidak diperpanjang. Dalam hal ini WNI tersebut memiliki 3 kasus yang berbeda. Penanganan kasus-kasus tersebut juga memiliki prosedur / SOP yang berbeda dengan target penyelesaian yang berbeda juga. Penyelesaian 3 kasus tersebut dapat terjadi tidak bersamaan karena terkait dengan pihak-pihak lain, seperti: pihak kepolisian, imigrasi, dan Kemenlu di Indonesia dan negara setempat.

Indikator Kinerja Utama: **IKU 1: Persentase Kasus Khusus yang Diselesaikan KJRI Hamburg**

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Kasus Khusus meliputi/mencakup/terdiri dari namun tidak terbatas pada kasus WNI/BHI di luar negeri yang termasuk dalam kategori high profile case (kasus hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, korban penyiksaan fisik berat, pemerkosaan, korban TPPO, kasus narkoba, evakuasi WNI (perang, bencana alam, kecelakaan pesawat/kapal laut, amnesti) serta kasus yang bersifat insidentil dan/atau massive yang memiliki ramifikasi yang cukup luas secara politis, ketertiban masyarakat, keselamatan jiwa WNI.

Kasus yang selesai adalah Kasus Khusus yang tertangani secara tuntas dan mencapai solusi akhir sesuai dengan target penyelesaian kasus, prosedur, aturan hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak WNI, kriteria/ruang lingkup kasus WNI/BHI di luar negeri.

Kasus yang ditangani adalah Kasus Khusus yang dihadapi oleh WNI di luar negeri sesuai dengan pengaduan, laporan, atau pun pemberitaan serta informasi yang diterima dari berbagai pihak, yang termasuk dalam lingkup pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.

Formula:

$$\frac{\textbf{Kasus khusus yang selesai}}{\textbf{Jumlah Kasus khusus yang ditangani}} \times 100\%$$

Tujuan:

Mengukur tingkat capaian penyelesaian kasus-kasus khusus WNI dan BHI di luar negeri

Satuan Pengukuran : Persentase

Tingkat Kendali IKU : ( ) High **(X) Moderate** ( ) Low

Tingkat Validitas IKU : **(X) Exact** ( ) Proxy ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Konsuler Perwakilan RI
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Konsuler Perwakilan RI
Sumber Data :	Laporan Penanganan Kasus, PORTAL Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri dan Berita Acara Serah Terima Penanganan Kasus
Jenis Cascading IKU:	**(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non peta ( ) Non-Cascading
Metode Cascading :	( ) Direct **(X) Indirect**
Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum ( ) Average **(X) Take Last Known Value**
Jenis Konsolidasi Lokasi :	( ) Sum ( ) Average **(X) Raw data**
Polarisasi Indikator Kinerja :	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan **(X) Triwulanan** ( ) Semesteran ( ) Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2016		2017		2018
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	75%
s.d TRIWULAN I	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d TRIWULAN II	N/A	N/A	N/A	N/A	25%
s.d TRIWULAN III	N/A	N/A	N/A	N/A	50%
s.d TRIWULAN IV	N/A	N/A	N/A	N/A	75%

Perspektif:	*Business Process*
Sasaran Strategis	Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri KJRI Hamburg yang Kuat
Deskripsi Sasaran Strategis:	Diplomasi Digital adalah diplomasi yang dilakukan dengan mengunakan internet untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Diplomasi digital menawarkan cara baru dalam berkomunikasi dalam mendukung aktifitas diplomasi, baik yang ditujukan kepada pemangku kepentingan, negara lain, serta publik. Dipomasi digital ditujukan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis informasi-informasi penting untuk mendukung kebijakan luar negeri; mengkomunikasikan posisi kebijakan luar negeri; serta melindungi kepentingan negara dan warga negara. Diplomasi Digital juga diartikan penggunaan media sosial untuk tujuan-tujuan diplomasi, yang dapat merubah pola kegiatan diplomat dalam hal pengelolaan informasi, diplomasi publik, perencanaan strategi, negosiasi internasional bahkan pengelolaan krisis. (Lihat Corneliu Bjola dan Marcus Holmes, 2015, Digital Diplomacy: Theory and Practice, New York: Routledge). Informasi hubungan luar negeri adalah pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu menyangkut aspek regional dan internasional, atau lembaga lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Kuat adalah memiliki keunggulan akurat dan aktual
Indikator Kinerja Utama:	**IKU 1: Persentase Peningkatan Impresi dan *Engagement* pada Media Sosial KJRI Hamburg**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	**Definisi:** Impresi adalah jumlah akun followers dan non-followers yang melihat suatu postingan di media sosial. *Engagement* adalah jumlah respons, retweet, share, dan likes terhadap suatu postingan di media sosial. Media sosial adalah suatu media dalam jaringan (online) di mana penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan suatu informasi. Media sosial yang diukur meliputi Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube. Dari hasil pengukuran dimaksud, dapat dilakukan penyusunan agenda setting konten media sosial yang disukai dan dapat menjangkau warganet yang lebih luas. **Formula:** $$\frac{\text{(jumlah impresi + engagement tahun berjalan) - (jumlah impresi + engagement tahun sebelumnya)}}{\text{(jumlah impresi + engagement tahun sebelumnya)}} \times 100\%$$ **Tujuan:** mengukur seberapa tingkat ketertarikan dan *engagement* publik terhadap isu-isu yang terkait kebijakan hublu RI di media sosial KJRI Hamburg
Satuan Pengukuran :	Persentase
Tingkat Kendali IKU :	( ) High **(X) Moderate** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU :	( ) Exact **(X) Proxy** ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Pensosbud
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Pensosbud
Sumber Data :	Laporan Impresi dan *Engagement* pada Media Sosial KJRI Hamburg
Jenis Cascading IKU:	**(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non peta ( ) Non-Cascading
Metode Cascading :	( ) Direct **(X) Indirect**

Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum	( ) Average	**(X) Take Last Known Value**	
Jenis Konsolidasi Lokasi :	( ) Sum	( ) Average	**(X) Raw data**	
Polarisasi Indikator Kinerja :	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	**(X) Tahunan**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2016		2017		2018
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	10%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

L1

Perspektif:	*Learning and Growth*
Sasaran Strategis:	Tata Kelola Organisasi KJRI Hamburg yang Baik
Deskripsi Sasaran Strategis:	**Definisi:** **Organisasi** adalah kesatuan bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. **Tata Kelola** merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi.
Indikator Kinerja Utama:	**IKU-1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KJRI Hamburg**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	**Definisi:** **Nilai evaluasi AKIP** adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sesuai dengan Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot, yaitu: (1) perencanaan kinerja: 30%; (2) pengukuran kinerja: 25%; (3) pelaporan kinerja: 15%; (4) evaluasi internal: 10%; dan (5) capaian kinerja: 20%. Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan (2) A (Skor > 80-90); Memuaskan (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik (4) B (Skor > 60-70); Baik (5) CC (>50-60); Cukup (6) C (>30-50); Kurang (7) D (0-30); Sangat Kurang
	Formula:
	-
	Tujuan:
	untuk mengukur sejauh mana Perwakilan RI telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.
Satuan Pengukuran :	Nilai (kategori)
Tingkat Kendali IKU :	( ) High **(X) Moderate** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU :	**(X) Exact** ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Seluruh Fungsi
Unit/Pihak Penyedia Data :	Inspektorat Jenderal
Sumber Data :	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Jenderal
Jenis Cascading IKU:	**(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non peta ( ) Non-Cascading
Metode Cascading :	( ) Direct **(X) Indirect**

Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum	( ) Average	**(X) Take Last Known Value**	
Jenis Konsolidasi Lokasi :	( ) Sum	( ) Average	**(X) Raw data**	
Polarisasi Indikator Kinerja :	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	**(X) Tahunan**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2016		2017		2018
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	70 (B)	70 (B)	75 (BB)	71.22 (BB)	76 (BB)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

L2

Perspektif:	*Learning and Growth*
Sasaran Strategis:	Sarana dan Prasarana KJRI Hamburg yang Memadai
Deskripsi Sasaran Strategis:	**Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana dan prasarana sangat menunjang kinerja Perwakilan RI dan merupakan salah satu prioritas Kemenlu dalam pemenuhannya dengan program tersendiri. **Memadai** adalah terpenuhi sesuai dengan rencana kebutuhan yang tercantum dalam DIPA.
Indikator Kinerja Utama:	**IKU-1 Persentase Sarana dan Prasarana KJRI Hamburg yang Dipenuhi Sesuai dengan Rencana**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	**Definisi:** **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Yang dipenuhi sesuai dengan rencana adalah terpenuhi sesuai dengan rencana kebutuhan yang tercantum dalam DIPA. Batasan Waktu: 1 tahun Anggaran **Formula:** $\frac{\textbf{Jumlah sarana dan prasarana yang dipenuhi sesuai dengan DIPA}}{\textbf{Total sarana dan prasarana yang direncanakan dalam dokumen DIPA}} \times 100\%$ **Tujuan:** untuk mengukur seberapa jauh memadai sarana dan prasarana KJRI Hamburg dalam mendukung kinerja
Satuan Pengukuran :	Persentase
Tingkat Kendali IKU :	( ) High **(X) Moderate** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU :	( ) Exact **(X) Proxy** ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	HOC
Unit/Pihak Penyedia Data :	BPKRT
Sumber Data :	Lapran realisasi pemenuhan sarana dan prasarana
Jenis Cascading IKU:	**(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non peta ( ) Non-Cascading
Metode Cascading :	( ) Direct **(X) Indirect**
Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum ( ) Average **(X) Take Last Known Value**
Jenis Konsolidasi Lokasi :	( ) Sum ( ) Average **(X) Raw data**

Polarisasi Indikator Kinerja :	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan	**(X) Triwulanan**	( ) Semesteran	( ) Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2016		2017		2018
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d TRIWULAN I	N/A	N/A	N/A	N/A	25%
s.d TRIWULAN II	N/A	N/A	N/A	N/A	50%
s.d TRIWULAN III	N/A	N/A	N/A	N/A	75%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

L3

Perspektif:	*Learning and Growth*
Sasaran Strategis:	Pengelolaan Anggaran KJRI Hamburg yang Optimal
Deskripsi Sasaran Strategis:	**Pengelolaan anggaran** adalah rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu (periode) di masa yang akan datang. **Optimal** berarti paling baik dan tertinggi **Ruang lingkup:** Anggaran yang Optimal dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja Utama:	**IKU-1 Persentase Realisasi Anggaran KJRI Hamburg**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	**Definisi:** Realisasi anggaran diukur melalui seberapa besar realisasi anggaran Perwakilan RI dalam jangka waktu 1 tahun anggaran dilihat dari akumulasi SP2D yang diterbitkan dibagi dengan pagu DIPA Perwakilan RI. Batasan waktu: 1 tahun anggaran **Formula:** $\frac{\textbf{Realisasi Anggaran KJRI Hamburg}}{\textbf{Total DIPA KJRI Hamburg}}$ **x100%** **Tujuan:** untuk mengukur seberapa jauh anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.
Satuan Pengukuran :	Persentase
Tingkat Kendali IKU :	( ) High **(X) Moderate** ( ) Low
Tingkat Validitas IKU :	**(X) Exact** ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Seluruh *Home Staf*
Unit/Pihak Penyedia Data :	BPKRT
Sumber Data :	SP2D
Jenis Cascading IKU:	**(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non peta () Non-Cascading
Metode Cascading :	( ) Direct **(X) Indirect**
Jenis Konsolidasi Periode :	( ) Sum ( ) Average **(X) Take Last Known Value**
Jenis Konsolidasi Lokasi :	( ) Sum ( ) Average **(X) Raw data**
Polarisasi Indikator Kinerja :	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan **(X) Triwulanan** ( ) Semesteran ( ) Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2016		2017		2018
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	95.30%	95.09%	100%	96.55%	100%
s.d TRIWULAN I	N/A	N/A	N/A	N/A	30%
s.d TRIWULAN II	N/A	N/A	N/A	N/A	50%
s.d TRIWULAN III	N/A	N/A	N/A	N/A	75%
s.d TRIWULAN IV	95.30%	95.09%	100%	96.55%	100%